



RENCANA KERJA 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan **"RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2026"**.

RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. RENJA Tahun 2026 ini merupakan acuan untuk perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA Tahun 2026 ini. Kami menyadari RENJA ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan RENJA selanjutnya.

Akhirnya semoga RENJA Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 14 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,


Drs. M. HAKRAM INDORO, M. Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika	12
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	 17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB	37
2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 40	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	46
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 70
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD.....	80
3.3 Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB	85
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	 91
 BAB V PENUTUP.....	 117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD). Proses penyusunan Renja PD Tahun 2026 terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Penyusunan Perencanaan 2026 merupakan tahun transisi, dimana secara simultan pada tahun 2026 juga sedang dilakukan penyusunan Renstra PD Tahun 2026-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2026-2030, yaitu Drs. H. Rijanto, MM dan H. Beky Herdihansah, yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2026 oleh Presiden Republik Indonesia.

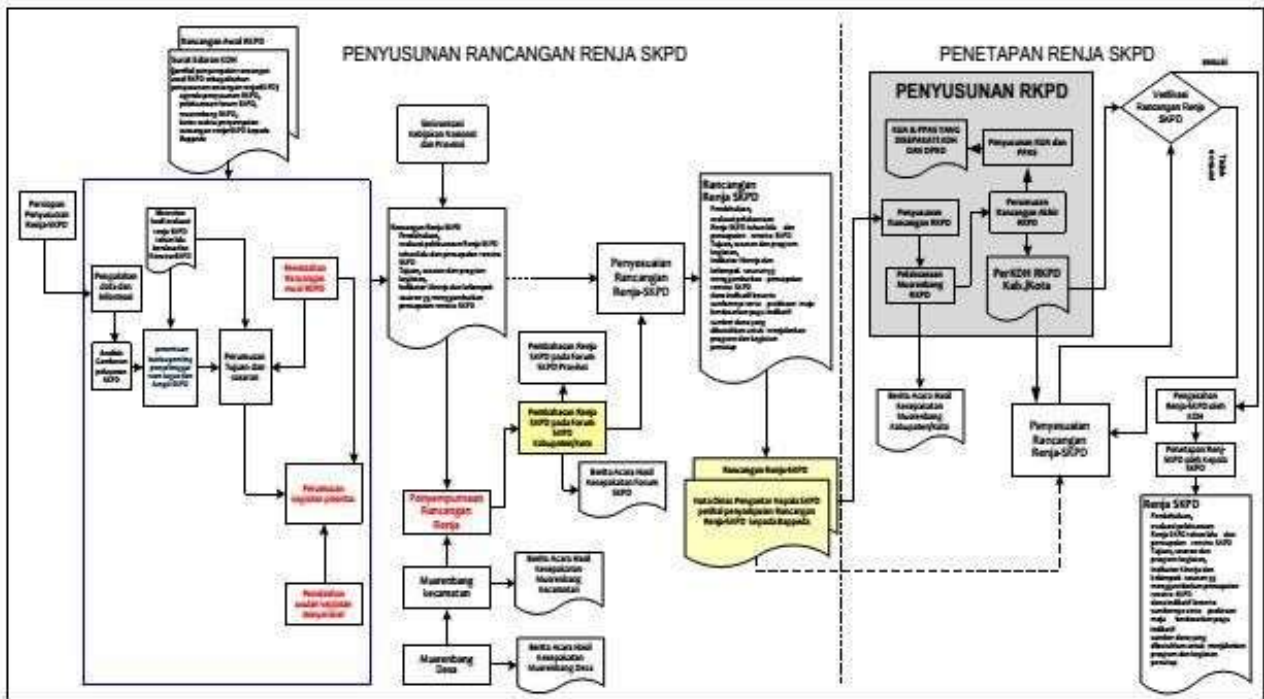
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal PD. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal PD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Bagan alir tahapan penyusunan Renja PD Kabupaten/Kota disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten/Kota



Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD.

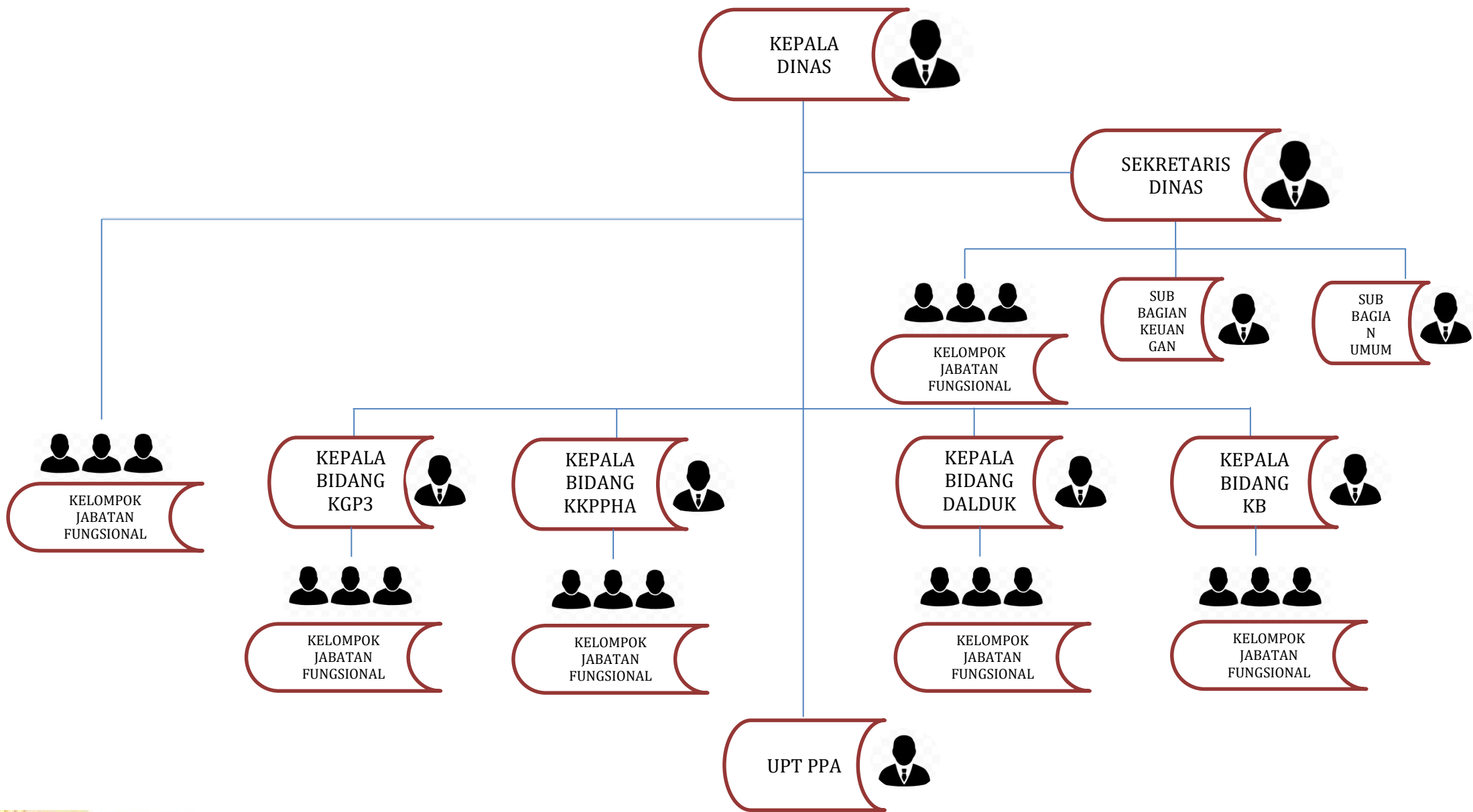
Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan SKPD yang mengampu 2 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik, maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara vertikal dan horisontal maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta

menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 dengan mengacu kepada tema, prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Blitar Kedudukan Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan Struktur Organisasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disajikan pada gambar 2.2 sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Stuktur Organisasi DINAS P3APPKB
Kabupaten Blitar**



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RENJA PD adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
 22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 23. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 I-6 Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);
 30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 31. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 33. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 34. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);



36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
37. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
38. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
39. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
40. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013



Nomor 3/E);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D);
48. Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.
49. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82).
50. Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENJA PD Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Hal ini disusun dengan menyesuaikan tujuan dan fungsi Dinas P3APPKB. Maka tujuan disusunnya Renja PD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 atau sumber dana lainnya. Menempatkan sasaran program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur Dinas P3APPKB.
2. Konsistensi dalam peningkatan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
4. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara targetkinerja dalam RKPD dengan Renja PD.
5. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program SKPD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang terimplementasi.
6. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



Pengendalian Penduduk dan KB, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) 3 SKPD Dinas P3APKB Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 138 ayat (1) mengenai Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

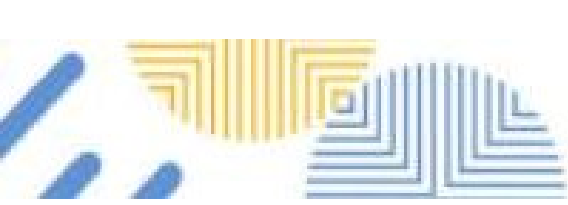
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD



Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Sub Bab ini berisi factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rancangan RKPD dan dituangkan dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, yaitu :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam



rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yaitu Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Badlatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur), maka Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, maka Dinas P3APPKB mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029, guna mendukung pencapaian misi tersebut, maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran SKPD yang dituangkan pada Renstra SKPD.

Secara umum Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik

Sebagaimana tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan sesuai dengan program, maka Dinas P3APPKB Kabupaten pada tahun 2024 melaksanakan 9 program, dan dijabarkan ke dalam 23 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
02.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	88	88	88	100	1,14	100	96	109,09
2.08 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	1,00	100	100	100

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7	2	2	2	1,00	3	7	100,0
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	1,00	3	5	100,0
2.08 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	1,00	100	100	100,0
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	24	25	1,04	28	25	104,17
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	413	100	100	61	0,61	340	501	121,31
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	14	1	1	1,00	12	27	45,0
2.08 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	80	80	100	1,25	100	86,67	108,3
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84	21	21	21	1,00	20	62	73,81
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4120	4000	1	1	1,00	1	4002	97,14
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295	75	80	70	0,88	85	230	77,97

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100		100	1	0,00	100	1	0,25
2.08 . 01 . 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100	80	80	80	1,00	100	86,67	86,67
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	1,00	12	36	60
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	1,00	12	36	60
2.08 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	80	80	80	1,00	84	81,33	101,67
2.08 . 01 . 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57	12	7	6	0,86	7	25	43,86

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08 . 01 . 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	12	7	6	0,86	7	25	41,67
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	17	22	8	0,36	8	33	68,75
02:08:02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	71,05	70	70,25	18,21	0,26	18,51	35,57	50,07
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,95	3,65	3,75	4,8	1,28	0	2,82	71,31
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,45	30,65	31,05	27,31	0,88	0	19,32	61,43
2.08 . 02 . 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	100	100	90	100	1,11	100	300	300
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 02 . 2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	31	0	307	54	0,18	40	94	303,23

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08 . 02 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	350	320	320	1850	5,78	320	2490	711,43
2.08 . 02 . 2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 02 . 2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6,01	6,02	6,02	12,44	2,07	6,02	14,91	3,73
2.08 . 03 . 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	95,7	93,1	92	100	1,09	93,35	279,04	69,76
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	Tingkat Kabupaten/Kota									
2.08 . 03 . 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	17,74	31,9	12,09	12,09	1,00	14,91	59,31	14,83
2.08.03.2.03.0005	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 03 . 2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 03 . 2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				150	#DIV/0!	248	398	#DIV/0!

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	16	14	14	31,42	2,24	14	59,42	371,375
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Puspaga) yang Berkembang	22	5	0	0	#DIV/0!	2	7	31,82
2.08.04.2.02.0007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	22	5	0	0	#DIV/0!	60	65	295,45
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori KLA	KLA	Nindya	Utama	Nindya	0,75	-	Utama	Utama
2.08 . 06 . 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100	100	100	100	1,00	55	255	255

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35	25	30	30	1,00	55	110	314,29
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang Dikuatkan dan Dikembangkan	95	90	90	100	1,11	0	190	200
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08.06.2.02.0009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	100	100	100	1,00	100	100	100

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.08 . 07 . 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	388	78	92	100	108,70	92	270	69,59
2.08 . 07 . 2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota	36	6	0	0	#DIV/0!	0	6	16,67
2.08 . 07 . 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	92	94,14	90,62	100	1,10	92	279,16	69,79
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08.07.2.02.00013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.08 . 07 . 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	14,91	31,85	12,09	12,09	1,00	14,91	59,26	14,82

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota telah terstandarisasi								
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				0	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!
2.08.07.2.03.00011	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	22	5		0	#DIV/0!	60	65	295,45
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	MUKP	21	21	20,6	22	1,07	0	43	204,76
2.14 . 02 . 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	8	2	2	1	0,50	1	4	50,00

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2.14.02.2.01.02	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan	5	1	1	1	1,00	1	3	60
2.14.02.2.01.0025	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				2	#DIV/0!	8	10	#DIV/0!
2.14 . 02 . 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	10	2	2	2	1,00	1	5	50
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!
2.14 . 02 . 2.02.0012	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1	#DIV/0!	12	1	0,25
2.14 . 02 . 2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB				12	#DIV/0!	12	12	3

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.14 . 02 . 2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1	#DIV/0!	1	2	#DIV/0!
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ASFR	8,25	9,24	9,24	18,7	2,02	18,4	15,45	187,23
		Unmetneed	7,24	8	8	8,6	1,08	8,3	8,3	114,64
2.14 . 03 . 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	3	10	10	1,00	10	23	5,75
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	22	22	22	1,00	22	66	300
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	12	12	3	0,25	2	17	141,67

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4	4	4	0	0,00	2	6	150
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24	4	4	10	2,50	15	29	120,83
2.14 . 03 . 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100	100	100	100	1,00	100	100	100
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744	744	744	744	1,00	248	1736	233,33
2.14 . 03 . 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100	100	100	100	1,00	100	100	100

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	12	12	1,00	12	36	300
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0	7814	7119	0,91	7000	14119	#DIV/0!
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	7	19	2,71	22	41	#DIV/0!
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	1	1	2	2,00	2	5	125
2.14 . 03 . 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80	80	80	80	1,00	80	80	100

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	37	37	37	248	6,70	248	533	1440,54
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	IPK	52,66	51,97	51,97	62	1,19	61,24	58,40	110,91
2.14 . 04 . 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	88	84	82	82	1,00	88	84,67	96,21
2.14.04.2.01.00016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	#DIV/0!
2.14.04.2.01.00017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22	22	22	22	1,00	0	22	100
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha	20	20	20	32	1,60	14	66	330

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia								
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60169	2829	60169	2829	0,05	0	5658	9,40

Sumber: Dinas P3APPKB

Berdasarkan data pada tabel 2.1. sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat pemutakhiran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P3APKB pada tahun 2026.

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2025 Dinas P3APKB telah melaksanakan 10 Program, 24 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, pada saat penyusunan dokumen ini realisasi program dan kegiatan masih belum dapat disimpulkan secara pasti karena program dan kegiatan berikut sub kegiatan sedang berjalan, namun kami optimis untuk dapat merealisasikan seluruh target baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang berjalan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target yang disebabkan adanya koordinasi baik dengan intern lingkungan Dinas P3APKB maupun lintas sektor, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target disebabkan adanya kerjasama dan hubungan baik intern maupun lintas sektor, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja yang telah memenuhi target, antara lain:

- a) Persentase Data Sektoral Terpilah yang Valid telah memenuhi target 100%;
- b) Cakupan Keluarga Berkualitas yang memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak target 16%;
- c) Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) adalah indeks yang dirilis setiap tahun oleh BKKBN untuk seluruh



Kabupaten dan Kota dengan target 62,0.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan.
- b) Adanya keterlambatan dana DAK dari pusat yang turun ke daerah.
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (staf) dalam membantu tugas bidang yang ada dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- d) Rendahnya persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah maupun di swasta disebabkan banyaknya persyaratan lapangan pekerjaan yang sulit dipenuhi oleh Perempuan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah memenuhi target, maka adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan. Namun, apabila program dan kegiatan belum memenuhi target maka akan menimbulkan permasalahan secara langsung maupun tidak langsung pada Program/Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dengan meningkatkan koordinasi sumber daya manusia guna mengoptimalkan pelaksanaan program



atau kegiatan sehingga target program atau kegiatan dapat tercapai, antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan Pagu Anggaran.
- b) Penyesuaian kebijakan keuangan daerah dengan perubahan belanja, dan pembiayaan daerah serta adanya kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025.
- c) Peningkatan koordinasi sumber daya manusia juga diperlukan untuk relevansi antara Program dengan Pagu Anggaran sehingga pada akhirnya tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Blitar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama tahun 2024 dan proyeksi s.d tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3APKB Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Indeks Pemberdayaan Gender	80,25	80,05	81,32	81,33	81,34	81,35	81,82		81,92	82,02	Realisasi sudah memenuhi target
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,95	-	3,75	3,85	3,95	-	4,80		3,85	3,95	Realisasi sudah memenuhi target
3	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	31,45	-	31,05	31,3	31,45	-	27,31		31,50	31,55	Realisasi belum sesuai target
4	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	88,25	-	87,95	57,51	57,61	57,7	57,41		57,65	58,0	Realisasi belum memenuhi target
5	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	93,15	100	100	100	100	100		100	100	Realisasi sudah memenuhi target
6	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	98,80	-	93,35	95,7	98,8	100	100		100	100	Realisasi sudah memenuhi target

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
7	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	94,00	-	92	93	94	100	100		100	100	Realisasi sudah memenuhi target
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	61,80	-	65,0	65,1	65,2	65,3	65,0		66,95	68,95	Realisasi sudah memenuhi target
9	Persentase m-CPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern)	61,80	-	68,03	73,84	76,84	79,84	70,84		72,96	75,14	Realisasi sudah memenuhi target
10	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	61,00	-	51,97	52,42	52,66	67,75	62,0		52,7	67,85	Realisasi sudah memenuhi target

Sumber: Dinas P3APPKB

Indikator kinerja di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dapat terealisasi melebihi target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga komitmen Pemerintah terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga semakin tinggi untuk revitalisasi Program KB.
2. Adanya dukungan dari mitra kerja dan Dinas instansi terkait untuk mendukung program dari Dinas P3APPKB baik yang terkait pengendalian penduduk, Keluarga Berencana serta mendukung pencapaian sasaran MDGs.
3. Koordinasi dengan Kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Blitar.

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar sampai pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan penurunan jumlah penduduk.

Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan bahwa untuk urusan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah merumuskan kebijakan teknis.

Kabupaten Blitar dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan



Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPPA Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas P3AK dan BKKBN Propinsi Jawa Timur
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, tentunya banyak permasalahan yang dihadapi baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2. Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar. Pada tahun sebanyak 61 kasus kekerasan dialami oleh perempuan dan pada anak sebanyak 89 kasus.
3. Walaupun telah mengalami penurunan angka permohonan rekomendasi perkawinan anak, namun angka pengajuan perkawinan anak masih cukup tinggi.
4. Kerja sama dengan Swasta terkait optimalisasi peran APSAI (Asosiasi Persatuan Sahabat Anak Indonesia) belum mencapai titik optimal.
5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024.
6. Masih belum seluruh Desa di Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh.
7. Masih belum seluruh sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah siaga kependudukan.

Dengan melihat isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas



dan fungsi SKPD, maka dapat dilakukan penyusunan strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kuantitas maupun kualitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya kaum wanita melalui pendidikan bimtek dan sosialisasi, seperti di kelompok PKK, GOW Fatayat, Aisyah dan Muslimat.
4. Meningkatkan advokasi dan promosi serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat mengenali kategori, menangani hingga melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan meningkatkan peran dan kompetensi satuan tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.
5. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua atau wali tentang penyadaran hukum terhadap peran perempuan dan hak-hak anak serta memberikan pelayanan maksimal secara kuantitatif & kualitatif kepada perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
6. Meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bersama sama menekan terjadinya perkawinan anak atas dasar alasan apapun.
7. Optimalisasi Advokasi bersama swasta khususnya perusahaan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan hak anak minimal di dalam lingkungan perusahaan masing masing.
8. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui pembinaan serta evaluasi kecamatan, desa, kelurahan layak anak. Mengikutkan forum anak dalam musrenbang juga musrendes. Merangkul semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk semua kegiatan harus responsif anak.
9. Optimalisasi pembinaan terhadap petugas lapangan dalam rangka mendapatkan data yang valid melalui pendataan keluarga dari rumah ke rumah. Strategi ini sangat perlu dilakukan karena



tingkat kesadaran dan kemampuan dari petugas lapangan dalam hal ini kader di desa masih tergolong rendah. Salah satu diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan kader untuk menerapkan pengumpulan data yang benar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap PLKB serta melibatkan PPKBD dan kader untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pendataan keluarga, melalui pelatihan dan sosialisasi.

10. Meningkatkan kualitas petugas lapangan melalui bimbingan dan pembinaan secara berkala kaitannya dengan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Melakukan advokasi kepada desa untuk menganggarkan guna memfasilitasi kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia Tangguh
12. Kedepannya akan bekerjasama dan melakukan advokasi Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar untuk dapat memasukkan isue kependudukan sebagai salah satu muatan local Pendidikan.

Program di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar berusaha dilaksanakan sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Blitar, Provinsi maupun Nasional di antaranya dengan cara:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menguatkan 17 kapasitas SDM melalui Bimtek dan Pelatihan, meningkatkan kinerja kelembagaan melalui pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kapasitas aparatur, mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.
- b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya, Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat, meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam



pembangunan, memperkuat lembaga/jejaring PUG.

- c. Program Perlindungan Perempuan bertujuan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat sipil dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan dengan tujuan pembentukan dan pengoptimalan standar layanan PUSPAGA dalam meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak bertujuan melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) bertujuan menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah,

masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.

- g. Program Perlindungan Khusus Anak memiliki tujuan meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- h. Program Pengendalian Penduduk dilakukan penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk dengan memanfaatkan jejaring yang ada baik dari institusi masyarakat, dinas terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama maupun lintas sektor.
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana telah dilaksanakan dengan memanfaatkan jejaring yang ada baik dari institusi masyarakat, Dinas terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama



maupun lintas sektor. Selanjutnya, untuk menggemakan kembali Program KB di masyarakat, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan beberapa kegiatan pada 248 Kampung KB yang ada di seluruh kecamatan diantaranya Pembentukan Pokja Kampung KB, Pertemuan Forum Kampung KB, Lokakarya Mini, Kegiatan Tribina, Operasional Penyuluhan KB, serta Rapat Teknis. Pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan pembangunan lainnya di Kampung KB, rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan-kegiatan di kampung KB, identifikasi permasalahan dan upaya mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi Kampung KB, Peningkatan Kualitas dan Strata kelompok Kegiatan TRIBINA, serta evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang dilaksanakan di 19 balai Penyuluhan KB. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh ketersediaan Balai Penyuluh KB.

- j. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJMD dan mencakup berbagai elemen perencanaan, termasuk proyeksi ekonomi daerah, skala prioritas pembangunan, serta rencana program dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya, RKPD juga memperhatikan kebijakan strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (Renja) guna memastikan kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah.

Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2025-2029) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik Domestik maupun Regional, Asean maupun Internasional. Dalam RKPD Kabupaten Blitar terdapat 10 (sepuluh) Program yang menjadi tanggungjawab Dinas P3APKB adalah Prioritas “ **Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial**”, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 3. Program Perlindungan Perempuan
 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 7. Program Perlindungan Khusus Anak
 8. Program Pengendalian Penduduk
 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
-
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar maka pada tahun 2026 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tahun 2026 dimana didalamnya terdapat 9 program, dan dijabarkan ke dalam 23 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

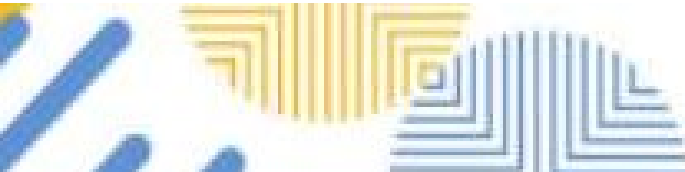
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	4.305.497.366	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	4.305.497.366	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	%	3.869.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	%	3.869.500	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Blitar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2	Dokumen	2.053.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Blitar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	2.053.900	Dokumen Renja Perubahan 2026, Renja 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.815.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	1.815.600	LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	%	3.443.343.266	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	%	3.443.343.266	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	3.411.035.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	3.411.035.266	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	31.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	31.500.000	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	808.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	808.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	%	132.467.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80	%	132.467.140	
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	Paket	23.106.140	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	Paket	23.106.140	
3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4120	Paket	10.246.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4120	Paket	10.246.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	99.115.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	99.115.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	80	%	191.785.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	80	%	191.785.800	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	191.785.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	191.785.800	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	%	343.493.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	%	343.493.160	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	74.321.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	74.321.160	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	Laporan	269.172.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	269.172.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	%	194.408.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	%	194.408.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	68.503.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	68.503.200	
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	8.436.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	8.436.000	
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	Unit	117.468.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	Unit	117.468.800	
II	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kab Blitar	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	100	%	807.550.900	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kab Blitar	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	18,41	%	807.550.900	
		Kab Blitar	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,95	%			Kab Blitar	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,95	%		
		Kab Blitar	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,74	%			Kab Blitar	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,74	%		
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	274	Dokumen	90.500.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	274	Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	274	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	274	Laporan	50.000.000	
1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	Lembaga	40.500.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	Lembaga	40.500.000	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1600	Orang	717.050.900	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1600	Orang	717.050.900	
2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	150	Orang	417.050.900	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	150	Orang	417.050.900	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2.2	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	0	Orang	300.000.000	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	0	Orang	300.000.000	
III	Program Perlindungan Perempuan	Kab Blitar	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6,02	Rasio	149.318.200	Program Perlindungan Perempuan	Kab Blitar	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6,02	Rasio	149.318.200	
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	30	Orang	66.558.200	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	30	Orang	66.558.200	
1.1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30	Orang	66.558.200	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30	Orang	66.558.200	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	20,56	%	82.760.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	20,56	%	82.760.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2.1	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	51	Lembaga	39.305.000	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	51	Lembaga	39.305.000	
2.2	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	22.500.000	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	22.500.000	
2.3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	51	Orang	20.955.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	51	Orang	20.955.000	
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab Blitar	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	18	%	53.255.500	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab Blitar	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	18	%	53.255.500	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Puspaga) yang Berkembang	22	Lembaga	53.255.500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Puspaga) yang Berkembang	22	Lembaga	53.255.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.1	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1	Lembaga	53.255.500	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1	Lembaga	53.255.500	
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab Blitar	Kategori KLA	KLA	Kategori	71.744.500	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab Blitar	Kategori KLA	KLA	Kategori	71.744.500	
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100	%	20.457.700	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100	%	20.457.700	
1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	20.457.700	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	20.457.700	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Layanan Anak yang Dikuatkan dan Dikembangkan	95	%	51.286.800	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Layanan Anak yang Dikuatkan dan Dikembangkan	95	%	51.286.800	

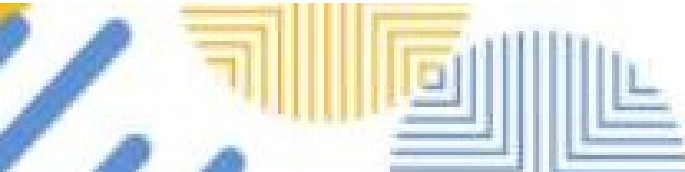
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100	Orang	41.618.800	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100	Orang	41.618.800	
2.2	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	3	Lembaga	9.668.000	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	3	Lembaga	9.668.000	
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Kab Blitar	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	%	340.002.300	Program Perlindungan Khusus Anak	Kab Blitar	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	%	340.002.300	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang	56.150.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang	56.150.000	
1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Kab Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota	6	Kegiatan	56.150.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Kab Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota	6	Kegiatan	56.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	100	%	177.242.300	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	100	%	177.242.300	
2.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	78	Orang	10.660.500	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	78	Orang	10.660.500	
2.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	78	Orang	166.581.800	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	78	Orang	166.581.800	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	20,56	%	106.610.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	20,56	%	106.610.000	
3.1	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Blitar	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2	Dokumen	52.500.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Blitar	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2	Dokumen	52.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3.2	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	150	Orang	54.110.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab Blitar	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	150	Orang	54.110.000	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
VII	Program Pengendalian Penduduk	Kab Blitar	MUKP	21	Tahun	562.600.000	Program Pengendalian Penduduk	Kab Blitar	MUKP	21	Tahun	562.600.000	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab Blitar	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	Kebijakan	28.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab Blitar	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	Kebijakan	28.000.000	
1.1	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan	1	Dokumen	3.000.000	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kab/Kota yang disusun dan dimanfaatkan	1	Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.2	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab Blitar	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	4	Satuan Pendidikan	25.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab Blitar	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	4	Satuan Pendidikan	25.000.000	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2	Dokumen	534.600.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2	Dokumen	534.600.000	
2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	Dokumen	3.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	Dokumen	3.000.000	
2.2	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	207.600.000	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	207.600.000	
2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB	1	Dokumen	264.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab Blitar	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB	1	Dokumen	264.000.000	
2.4	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	Laporan	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	Laporan	60.000.000	
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kab Blitar	ASFR	8,25		6.417.406.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kab Blitar	ASFR	8,25		6.417.406.000	
		Kab Blitar	Unmetneed	7,24				Kab Blitar	Unmetneed	7,24			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Blitar	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	Unit	1.783.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Blitar	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	Unit	1.783.000.000	
1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	Laporan	1.078.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22	Laporan	1.078.000.000	
1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	330.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	330.000.000	

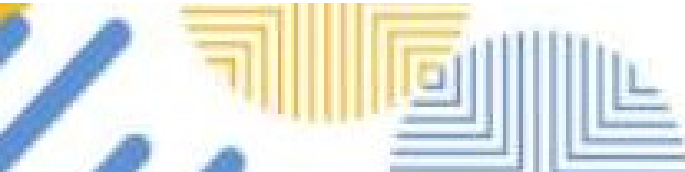


No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Blitar	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2	Dokumen	125.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Blitar	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2	Dokumen	125.000.000	
1.4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10	Organisasi	250.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10	Organisasi	250.000.000	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab Blitar	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100	%	744.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab Blitar	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)				
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	248	Orang	744.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	248	Orang	744.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100	%	3.184.806.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100	%	3.184.806.000	
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	44.100.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	44.100.000	
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814	Orang	3.105.156.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814	Orang	3.105.156.000	
3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Unit	-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				
3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	Laporan	35.550.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	Laporan	35.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab Blitar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80	%	705.600.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab Blitar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80	%	705.600.000	
4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	248	Kampung	705.600.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	248	Kampung	705.600.000	
IX	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kab Blitar	IPK	52,66	Indeks	6.746.257.000	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kab Blitar	IPK	52,66	Indeks	6.746.257.000	
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Blitar	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	88	%	6.746.257.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Blitar	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	88	%	6.746.257.000	
1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	22	Laporan	96.000.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	22	Laporan	96.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Laporan	296.457.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Laporan	296.457.000	
1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13	Unit	130.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13	Unit	130.000.000	
1.4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2829	Orang	6.223.800.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab Blitar	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2829	Orang	6.223.800.000	



Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemilihan sub kegiatan disebabkan adanya penyesuaian Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada Tingkat Dinas P3APPKB. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan Sosialisasi dan Penyuluhan.

Proses usulan program atau kegiatan dilakukan dari bawah didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang tingkat RT, RW dan Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing- masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing-masing perwakilan dari Kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada Tingkat Dinas P3APPKB.

Pada tahun 2026 Dinas P3APPKB turut andil pada Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan munculnya usulan untuk Program Pengarusutamaan Gender (PUG); Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Perempuan; Perlindungan Khusus Anak dan Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Usulan Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 akan disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Usulan Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026 Kabupaten Blitar

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Usulan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Pojok, Kab. Blitar	150 Orang	90	100.000.000	
2	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kantor Desa Wonorejo, Kab. Blitar	150 Orang	50	27.500.000	
3	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan (PENA INTAN)	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Kaweron, Kab. Blitar	30 Orang	50	22.500.000	
4	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Klemunan, Kab. Blitar	150 Orang	60	33.000.000	
5	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Tangkil, Kab. Blitar	151 Orang	50	27.500.000	
6	Bimtek Menuju Perwujudan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) (PENA INTAN)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Urip Sumoharjo 28, Kab. Blitar	2 Lembaga	50	22.500.000	
7	Bimtek Menuju Perwujudan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) (PENA INTAN)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Jatilengger, Kab. Blitar	2 Lembaga	40	18.000.000	

No	Usulan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak (PENA INTAN)	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Desa sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	2 Dokumen	30	15.000.000	
9	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak (PENA INTAN)	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	dsn Udanawu RT 2 RW 2 , Kab. Blitar	2 Dokumen	30	15.000.000	
10	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dsn Cungkup RT 01 RW 03, Desa Ngrendeng, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar , Kab. Blitar	150 Orang	50	27.500.000	
11	Sosialisasi Sekolah Orangtua Hebat (PENA INTAN)	Promosi dan Sosilaisasi Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Plumpungrejo, Kab. Blitar	4 Laporan	150	135.000.000	
12	Sosialisasi Sekolah Orangtua Hebat (PENA INTAN)	Promosi dan Sosilaisasi Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Jalan raya keloed 64 semen blitar Kantor Desa Semen, Kab. Blitar	4 Laporan	15	13.500.000	
13	Sosialisasi Sekolah Orangtua Hebat (PENA INTAN)	Promosi dan Sosilaisasi Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Desa Soso, Kab. Blitar	4 Laporan	15	13.500.000	
14	Sosialisasi Sekolah Orangtua Hebat (PENA INTAN)	Promosi dan Sosilaisasi Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Desa Jambepawon, Kab. Blitar	4 Laporan	20	18.000.000	

No	Usulan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak (PENA INTAN)	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Desa Rejosari, Kab. Blitar	2 Dokumen	50	22.500.000,00	
16	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sesuai Potensi Wilayah Pengusul (PENA INTAN)	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Sumberarum, Kab. Blitar	150 Orang	80	44.000.000	
Jumlah						555.000.000	

Sumber: Dinas P3APPKB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Indonesia Emas 2045 sebagaimana dijabarkan dengan perumusan tujuan “**Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Berkualitas**”.

Untuk memastikan tujuan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2025-2029 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2025-2029.

Sasaran strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dapat tercapai 63,5 di tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 65,2 pada tahun 2026;
- 2) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,12 pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 2,11 pada 2026.
- 3) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 19,4 per 1.000 kelahiran pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 19 per 1.000 kelahiran pada 2026.
- 4) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,8 persen pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi

61,9 persen pada tahun 2026.

- 5) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmetneed 10,5 persen pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 10 persen pada 2026.
- 6) Menurunkan Persentase Kejadian Tidak Direncanakan (Jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak kemudian/Jumlah ibu hamil) tercapai 12,60% pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 12,20% pada tahun 2026;
- 7) Meningkatkan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dapat tercapai 35% pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 40% pada tahun 2026;
- 8) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 64,1 pada tahun 2025 serta ditargetkan menjadi 65,8 pada tahun 2026.
- 9) Meningkatkan Indeks Lansia Berdaya menjadi 61,25 pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 61,5 pada tahun 2026;
- 10) Meningkatkan Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja dapat dicapai 85,20 pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 85,70 pada tahun 2026.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kependudukan

- a) Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di seluruh tingkatan wilayah;
- b) Penguatan sinergitas perencanaan dan konvergensi pelaksanaan pengendalian penduduk antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c) Penyediaan dan pemanfaatan parameter pengendalian kependudukan;
- d) Peningkatan kerjasama pendidikan Kependudukan dengan instansi/lembaga pendidikan;
- e) Penguatan implementasi penanganan terpadu dampak kependudukan

2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

- a) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di fasilitas pelayanan kesehatan;

- b) Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
- c) Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) berdasarkan siklus hidup;
- d) Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah dan sasaran khusus;
- e) Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai segmentasi sasaran;
- f) Mendorong pengembangan inovasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
- g) Peningkatan jejaring komitran program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
- h) Peningkatan Kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun), terutama fase 1000 HPK;
- i) Pendampingan Pengasuhan di Tempat Penitipan Anak melalui standarisasi kompetensi fasilitator pengasuhan anak usia dini, pemantauan tumbuh kembang anak usia dini secara berkala, pelibatan orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan memperkuat layanan rujukan;
- j) Peningkatan kualitas remaja termasuk pra-remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- k) Peningkatan pengetahuan remaja dan calon pengantin dalam pencegahan dan penurunan stunting;
- l) Peningkatan kualitas ayah dalam pengetahuan pengasuhan anak dan pendampingan remaja;
- m) Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga dan keterlibatan lansia dalam perawatan kesehatan, aktivitas sosial, kesempatan berwirausaha serta pemberian fasilitas kemudahan bagi lansia dengan keterlibatan multi sektor;
- n) Pendampingan dan pembinaan sasaran keluarga rentan melalui pelayanan konsultasi dan konseling keluarga pada Satyagatra;
- o) Pendampingan dan pembinaan kemandirian ekonomi keluarga;
- p) Penguatan program pembangunan keluarga berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan dan strategi tahun 2025-2029 yang akan ditempuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;

- f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program pembangunan^[1] dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

1. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- b. Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan

hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada *day care*/Tempat Penitipan Anak;

- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya, melalui peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program pembangunan^[1] dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara KemenPPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerjasama antara KemenPPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-

learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;

- c. Peningkatan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
- d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
- e. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- f. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam mengasuh dan melindungi anak dan orang tua guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan, melalui gerakan sayang keluarga dan mengoptimalkan kelembagaan PKK, dasawisma, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

3. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam

pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- d. Memperkuat sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus berjalan dengan baik;
- f. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan sertifikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO, dan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA; dan
- g. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

4. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media

massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

- c. Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan baik di pusat dan daerah;
- d. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan sertifikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- e. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.

5. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi

- pemetaan proses bisnis, pentapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD

Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dan provinsi, serta berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar 2026, maka ditetapkan tujuan strategis rencana kerja SKPD Tahun 2026 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender dan Anak serta Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang Berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penanganan perlindungan perempuan dan anak serta Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak (PUG & PUHA) dan pemberdayaan perempuan.
- 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan upaya peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas dan upaya peningkatan ketahanan keluarga.
- 5) Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selain itu, Dinas P3APPKB juga turut serta mewujudkan keenam misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, meliputi:

- a) Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.

- b) Misi II : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
- c) Misi III : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
- d) Misi IV : Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2025-2029 tersebut, maka Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar memiliki tugas dan fungsi serta berperan dalam mendorong tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dari visi misi tersebut terperinci tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak		Meningkatnya pemberdayaan dan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan terlaksananya pembinaan

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perlindungan perempuan		pemberdayaan perempuan dibidang politik, pendidikan dan ekonomi
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender	Tersedianya data terpilah gender
			Meningkatnya perlindungan perempuan	1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi , Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Meningkatnya perlindungan kekerasan terhadap anak	1. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Koordinasi dan

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus serta pencegahan kekerasan 3. Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi dan memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk	Terlaksananya Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan
				Terlaksananya Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta pembentukan Rumah Data Kependudukan
			Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pelayanan KB MKJP serta Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi pelaksanaan program di kampung KKBPK	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
				Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya dan meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan

Sumber: Dinas P3APPKB

3.3. Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB

Rencana 9 Program, 23 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan Dinas P3APPKB Kab. Blitar yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Perlindungan Perempuan

- 1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan

Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- a. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - b. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

VII. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

VIII. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - d. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

IX. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 yaitu **“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas”**, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Renstra Dinas P3APPKB Tahun 2025-2029 di tampilkan dalam tabel berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2026 serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2025-2029. Sesuai dengan Surat Nomor: B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 perihal Penyelarasan Rancangan Renja PD dengan Rencana Pendanaan Indikatif Belanja PD Tahun 2026 maka pada Rancangan Akhir Renja 2026 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitra menyusun 9 program, 23 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan rincian Rp. 5.521.048.266,- dari Dana Alokasi Umum dan Rp. 13.396.453.000,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sehingga di tahun 2024 Dinas P3APPKB melaksanakan anggaran sebesar Rp.19.457.501.266,- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten merupakan program yang melaksanakan kegiatan rutin seperti perencanaan penganggaran dan keuangan, administrasi perkantoran seperti surat menyurat, materai, pemenuhan kebutuhan listrik, telpon, air, tabung gas, makan minum, perjalanan dinas, dokumentasi dan dekorasi, majalah, alat listrik, alat kebersihan, ATK dan pembayaran jasa teknis lainnya.

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah bentuk rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program peningkatan kelembagaan perempuan dan anak. Dimana program ini dilaksanakan untuk menyediakan pengarusutamaan gender bagi perempuan dan pengarusutamaan hak anak bagi anak, keterlibatan perempuan dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang terwadahi dalam GOW, meliputi organisasi Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit Yonif 511, Muslimat NU, Fatayat NU, Persit Kodim 0808, Dharma Yukti Karini, WKRI, PERISKA, Pos Indo, Perip, Al hidayah, tiara kusuma, harphi melati, wanita PGRI, HWK, Perwari, WHDI, IBI, IIDI, IGTKI, Salimah, PIFERI, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Perwosi.

Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak merupakan program yang dilaksanakan untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor ke UPT PPA ataupun UPPA (Unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres) untuk mendapatkan pelayanan dan penyelesaian kasus yang dibutuhkan oleh korban. Program ini juga melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak serta membina tokoh masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

lingkungan sekitarnya.

Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan (Nasional dan Daerah) sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan dengan menerapkan prinsip dan kepentingan anak (*the best interest of the child*). Dengan adanya kelembagaan PUHA diharapkan nantinya kepedulian dan pemahaman mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak anak akan semakin cepat terwujud. Keterlibatan anak dalam organisasi anak terwadahi dalam OSIS, Pramuka, PMR, TPQ, PIK – R.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah program yang berupaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan Puspaga atau Pusal Pembelajaran Keluarga.

Program Pengendalian Penduduk adalah pengembangan sistem pengendalian penduduk, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan papan informasi kependudukan di kampung KB, MOU dengan sekolahan untuk membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), menyediakan data keluarga dengan melakukan update data melalui pendataan keluarga setiap tahun sekali oleh para kader pendata di desa dengan bimbingan para PLKB Kecamatan dan penyusunan profil pengendalian penduduk yang berupa Penyusunan parameter kependudukan dan Grand Design pengendalian penduduk & pembangunan keluarga berupa buku yang berisi tentang program pengendalian penduduk, target , dsb selama 5 tahun ke depan, sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan di Kab. Blitar.

Program Pembinaan Keluarga Berencana merupakan program yang diselenggarakan untuk mengendalikan jumlah penduduk, dengan meningkatkan kesertaan ber KB dari Pasangan Usia Subur yang ada melalui kegiatan safari KB secara reguler maupun dengan memanfaatkan momentum yang ada, seperti Safari KB dalam rangka hari ulang tahun TNI, PKK, IBI, Hari Keluarga Nasional, dll yang diselenggarakan di masing – masing Kecamatan ataupun di Rumah Sakit Swasta yang sudah ditunjuk oleh Dinas P3APKB. Mengoptimalkan kegiatan pelayanan program Bangga Kencana dengan memberikan sarana prasarana kepada fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) dan balai penyuluh KB, juga dengan memberikan

penyuluhan, pergerakan dan pembinaan serta peningkatan operasional Bangga Kencana kepada kampung KB, balai penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mengadakan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga pada kegiatan kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) , peningkatan ekonomi keluarga pada kelompok UPPKA dan pembinaan remaja melalui kelompok PIK – R.

TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN BLITAR

KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
					CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										19.457.501.266,00				26.184.528.800,04
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.305.497.366	DAU	100	%	4.595.752.911
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.869.500	DAU	100	%	3.718.919
2	08	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.053.900	DAU	7	Dokumen	1.781.815
2	08	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					-	DAU		Laporan	211.250
2	08	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					-	DAU		Laporan	201.184
2	08	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.815.600	DAU	6	Dokumen	1.524.670
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.443.343.266	DAU	100	%	3.767.538.613
2	08	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.411.035.266	DAU	24	Orang/bulan	3.767.538.613
2	08	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					31.500.000	DAU	1	Dokumen	37.360.059
2	08	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					808.000	DAU	12	Laporan	757.692
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.467.140	DAU	80	%	313.418.831
2	08	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.106.140	DAU	35	Paket	32.708.600
2	08	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					-	DAU	5	Paket	45.479.380
2	08	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					10.246.000	DAU	4120	Paket	8.716.559
2	08	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					99.115.000	DAU	100	Laporan	186.666.846
2	08	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					-	DAU	12	Dokumen	39.847.446

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					191.785.800	DAU	80	%	176.925.981	
2	08	01	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					191.785.800	DAU	60	Unit	176.925.981	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					343.493.160	DAU	80	%	232.676.669	
2	08	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					74.321.160	DAU	12	Laporan	77.423.984	
2	08	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					269.172.000	DAU	12	Laporan	155.252.685	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.408.000	DAU	80	%	104.166.653	
2	08	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					68.503.200	DAU	11	Unit	41.598.805	
2	08	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8.436.000	DAU	12	Unit	18.570.895	
2	08	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					117.468.800	DAU	48	Unit	43.996.953	
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					807.550.900	DAU/DAK			1.559.154.325	
					Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD							18,41	%		
					Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah							3,95	%		
					Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta							31,74	%		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					90.500.000	DAU	100	%	966.311.046	
2	08	02	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					50.000.000	DAU	274		369.855.523	
2	08	02	2.01	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					-	DAU		Laporan	369.855.523	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	02	2.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						40.500.000	DAU	0		226.600.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						717.050.900	DAU	1600	Orang	592.843.280
2	08	02	2.02	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						-	DAU	0	Lembaga	110.000.000
2	08	02	2.02	6	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	110.000.000
2	08	02	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						417.050.900	DAU	150	Orang	152.843.280
2	08	02	2.02	9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000.000	DAU	0	Orang	220.000.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan						149.318.200	DAU/DAK	6,02	Rasio	932.738.117
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						66.558.200	DAU/DAK	30	Orang	653.374.797
2	08	03	2.02	6	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						66.558.200	DAU/DAK	30	Orang	327.806.079
2	08	03	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	30	Orang	159.709.700
2	08	03	2.02	9	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	30	Orang	165.859.019
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						82.760.000	DAU/DAK	20,56	%	279.363.321
2	08	03	2.03	5	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						39.305.000	DAU/DAK	51	Lembaga	279.363.321
2	08	03	2.03	7	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota						22.500.000	DAU/DAK	30	Orang	65.397.797

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	03	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						20.955.000	DAU/DAK	51	Orang	65.397.797
2	08	04	2.01		Program Peningkatan Kualitas Keluarga						53.255.500	DAU	18	%	1.434.847.712
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU	22	Lembaga	738.357.280
2	08	04	2.01	4	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						-	DAU	2	Lembaga	165.000.000
2	08	04	2.01	5	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	1	Kebijakan	165.000.000
2	08	04	2.01	6	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.						-	DAU	0	Dokumen	181.500.000
2	08	04	2.01	7	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Laporan	226.857.280
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						53.255.500	DAU	22	Lembaga	696.490.432
2	08	04	2.02	6	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	302.184.730
2	08	04	2.02	7	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						53.255.500	DAU	1	Lembaga	197.152.851
2	08	04	2.02	8	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	197.152.851
2	08	05			Program Pengeloaan Sistem Data Gender dan Anak						-	DAU	100	%	1.398.003.516
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU			1.398.003.516
2	08	05	2.01	3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota						-	DAU	8	Dokumen	1.398.003.516
2	08	6			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						71.744.500	DAU	KLA	Kategori	715.314.697

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						20.457.700	DAU	100	%	403.421.750
2	08	6	2.01	3	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						20.457.700	DAU	30	Lembaga	71.188.432
2	08	6	2.01	4	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Orang	166.116.659
2	08	6	2.01	5	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Orang	166.116.659
2	08	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						51.286.800	DAU	95	%	311.892.947
2	08	6	2.02	6	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						41.618.800	DAU	100		249.989.962
2	08	6	2.02	9	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						9.668.000	DAU	3		61.902.985
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak						340.002.300	DAU/DAK	100		1.054.651.334
2	08	7	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						56.150.000	DAU/DAK	70		250.679.323
2	08	7	2.01	6	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota						-	DAU/DAK	2	Dokumen	194.529.323
2	08	7	2.01	7	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA						56.150.000	DAU/DAK	6	Kegiatan	56.150.000
2	08	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						177.242.300	DAU/DAK	100	%	583.263.911

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	7	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						10.660.500	DAU/DAK	78	Orang	291.631.956
2	08	7	2.02	13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						166.581.800	DAU/DAK	78	Orang	291.631.956
2	08	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						106.610.000	DAU/DAK	20,56	%	220.708.100
2	08	7	2.03	7	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota						52.500.000	DAU/DAK	2	KIE	37.141.791
2	08	7	2.03	9	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota						-	DAU/DAK	1	Dokumen	91.424.518
2	08	7	2.03	11	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	6	Lembaga	37.141.791
2	08	7	2.03	13	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai						54.110.000	DAU/DAK	150	Orang	55.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	14	2			Program Pengendalian Penduduk						562.600.000	DAU/DAK	21	Usia	661.481.431
2	14	1	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						28.000.000	DAU/DAK	2	Kebijakan	63.999.511
2	14	1	2.01	25	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						3.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	9.905.107
2	14	1	2.01	27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal						25.000.000	DAU/DAK	4	Satuan Pendidikan	25.000.000
2	14	1	2.01	28	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						-	DAU/DAK	0	Laporan	6.190.298

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	1	2.01	30	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						-	DAU/DAK	2	Laporan	6.190.298
2	14	1	2.01	32	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)						-	DAU/DAK	1	Dokumen	4.333.209
2	14	1	2.01	33	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	1	Dokumen	12.380.599
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						534.600.000	DAU/DAK	2	Dokumen	597.481.920
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						3.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	37.141.790
2	14	2	2.02	12	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga						207.600.000	DAU/DAK	1	Dokumen	207.600.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						264.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	264.000.000
2	14	2	2.02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						60.000.000	DAU/DAK	12	Laporan	60.000.000
2	14	2	2.02	22	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan						-	DAU/DAK	1	Dokumen	15.475.746
2	14	2	2.02	26	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						-	DAU/DAK	248	Unit	6.190.298
2	14	2	2.02	27	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						-	DAU/DAK	1	Dokumen	7.074.086
2	14	3			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						6.417.406.000	DAU/DAK			6.841.450.884,00
2	14	3			ASFR							DAU/DAK	8,25		
2	14	3			Unmetneed							DAU/DAK	7,24		
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.783.000.000	DAU/DAK	10	Unit	1.293.721.821

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	3	2.01	8	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						-	DAU/DAK	4	Laporan	73.909.141
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						1.078.000.000	DAU/DAK	22	Laporan	433.320.892
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						330.000.000	DAU/DAK	3	Laporan	363.000.000
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						-	DAU/DAK	4	Dokumen	38.379.850
2	14	3	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						125.000.000	DAU/DAK	2	Dokumen	137.500.000
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						250.000.000	DAU/DAK	10	Organisasi	247.611.938
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						744.000.000	DAU/DAK	100	%	2.685.987.761
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						-	DAU/DAK	7	Unit	1.912.975.302
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						744.000.000	DAU/DAK	248		606.649.249
2	14	3	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						-	DAU/DAK	3270	Organisasi	82.175.151
2	14	3	2.02		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						-	DAU/DAK	30	Laporan	84.188.059
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3.184.806.000	DAU/DAK	100	%	1.598.302.676
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						44.100.000	DAU/DAK	12	Laporan	45.000.000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						3.105.156.000	DAU/DAK	7814	Orang	800.748.096

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						-	DAU/DAK	0	Unit	653.695.513
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						35.550.000	DAU/DAK	2	Laporan	86.478.469
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						-	DAU/DAK	0	Orang	12.380.598
2	14	4	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						705.600.000	DAU/DAK	80	%	1.263.438.625
2	14	4	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						705.600.000	DAU/DAK	248	Kampung	706.000.000
2	14	4	2.04	7	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						-	DAU/DAK	248	Dokumen	557.438.625
2	14	4			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						6.746.257.000	DAU/DAK	52,66	Indeks	6.897.503.953
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6.746.257.000	DAU/DAK	88	%	6.897.503.953
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						96.000.000	DAU/DAK	22	Laporan	105.600.000
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						296.457.000	DAU/DAK	4	Laporan	325.904.700
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						130.000.000	DAU/DAK	13	Unit	140.000.000
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						-	DAU/DAK	0	Orang	6.190.298

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	4	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						6.223.800.000	DAU/DAK	2829	Orang	6.300.000.000
2	14	4	26	25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						-	DAU/DAK	1	Laporan	12.380.598
2	14	4	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						-	DAU/DAK	25	Kelompok	7.428.357

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2026 serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Surat Edaran Bupati Nomor B/050/345.1/409.3.2/2024 Tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana maka pada Rancangan Awal Renja 2026 Dinas P3APPKB menyusun 10 program, 22 kegiatan, 42 sub kegiatan dengan rincian Rp. 5.596.545,- dari Dana Alokasi Umum dan Rp. 4.889.261.671,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sehingga di tahun 2026 Dinas P3APPKB melaksanakan anggaran sebesar Rp.14.093.101.000,- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten merupakan program yang melaksanakan kegiatan rutin seperti perencanaan penganggaran dan keuangan, administrasi perkantoran seperti surat menyurat, materai, pemenuhan kebutuhan listrik, telpon, air, tabung gas, makan minum, perjalanan dinas, dokumentasi dan dekorasi, majalah, alat listrik, alat kebersihan, ATK dan pembayaran jasa teknis lainnya.

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah bentuk rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program peningkatan kelembagaan perempuan dan anak. Dimana program ini dilaksanakan untuk menyediakan pengarusutamaan gender bagi perempuan dan pengarusutamaan hak anak bagi anak, keterlibatan perempuan dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang terwadahi dalam GOW, meliputi organisasi Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit Yonif 511, Muslimat NU, Fatayat NU, Persit Kodim 0808, Dharma Yukti Karini, WKRI, PERISKA, Pos Indo, Perip, Al Hidayah, Tiara Kusuma, Harphi Melati, Wanita PGRI, HWK, Perwari, WHDI, IBI, IIDI, IGTKI, Salimah, PIFERI, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Perwosi.

Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak merupakan program yang dilaksanakan untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor ke UPT PPA ataupun UPPA (Unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres) untuk mendapatkan pelayanan dan penyelesaian kasus yang dibutuhkan oleh korban dengan program inovasi publik bajuku libas dosa (Pengaduan, konsultasi psikologis, konsultasi hukum, pelayanan

kesehatan/visum, pemberian sembako, perlindungan di rumah aman, konsultasi tokoh agama dan rujukan ke pondok pesantren). Program ini juga melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak serta membina tokoh masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya.

Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan (nasional dan daerah) sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan dengan menerapkan prinsip dan kepentingan anak (the best interest of the child). Dengan adanya kelembagaan PUHA diharapkan nantinya kepedulian dan pemahaman mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak anak akan semakin cepat terwujud. Keterlibatan anak dalam organisasi anak terwadahi dalam OSIS, Pramuka, PMR, TPQ, PIK – R.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai sektor dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak, secara up to date dan akurat, maka diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mendukung dan mengisi data indikator dan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah. Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi dan perkembangan) keadaan laki-laki dan perempuan termasuk anak, Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan, serta dapat Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman laki-laki dan perempuan.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah program yang berupaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan Puspaga atau Pusal Pembelajaran Keluarga.

Program Pengendalian Penduduk adalah pengembangan sistem pengendalian penduduk, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan papan informasi kependudukan di kampung KB, MOU dengan sekolahan untuk membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK),

menyediakan data keluarga dengan melakukan update data melalui pendataan keluarga setiap tahun sekali oleh para kader pendata di desa dengan bimbingan para PLKB Kecamatan dan penyusunan profil pengendalian penduduk yang berupa Penyusunan parameter kependudukan dan Grand Design pengendalian penduduk & pembangunan keluarga berupa buku yang berisi tentang program pengendalian penduduk, target, dsb selama 5 tahun ke depan, sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan di Kab. Blitar.

Program Pembinaan Keluarga Berencana merupakan program yang diselenggarakan untuk mengendalikan jumlah penduduk, dengan meningkatkan kesertaan ber KB dari Pasangan Usia Subur yang ada melalui kegiatan safari KB secara reguler maupun dengan memanfaatkan momentum yang ada, seperti Safari KB dalam rangka hari ulang tahun TNI, PKK, IBI, Hari Keluarga Nasional, dll yang diselenggarakan di masing – masing Kecamatan ataupun di Rumah Sakit Swasta yang sudah ditunjuk oleh Dinas P3APKB. Mengoptimalkan kegiatan pelayanan program Bangga Kencana dengan memberikan sarana prasarana kepada fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) dan balai penyuluh KB, juga dengan memberikan penyuluhan, penggerakan dan pembinaan serta peningkatan operasional Bangga Kencana kepada kampung KB, balai penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mengadakan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga pada kegiatan kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL), peningkatan ekonomi keluarga pada kelompok UPPKA dan pembinaan remaja melalui kelompok PIK – R.

Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.457.501.266,00					26.184.528.800,04			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.305.497.366		DAU	100	%	4.595.752.911		
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.869.500		DAU	100	%	3.718.919		
2	08	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.053.900		DAU	7	Dokumen	1.781.815		
2	08	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		DAU		Laporan	211.250		
2	08	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		DAU		Laporan	201.184		
2	08	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.815.600		DAU	6	Dokumen	1.524.670		
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.443.343.266		DAU	100	%	3.767.538.613		
2	08	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.411.035.266		DAU	24	Orang/bulan	3.767.538.613		
2	08	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.500.000		DAU	1	Dokumen	37.360.059		
2	08	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			808.000		DAU	12	Laporan	757.692		
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.467.140		DAU	80	%	313.418.831		
2	08	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.106.140		DAU	35	Paket	32.708.600		
2	08	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-		DAU	5	Paket	45.479.380		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.246.000	DAU	4120	Paket	8.716.559
2	08	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						99.115.000	DAU	100	Laporan	186.666.846
2	08	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						-	DAU	12	Dokumen	39.847.446
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						191.785.800	DAU	80	%	176.925.981
2	08	01	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						191.785.800	DAU	60	Unit	176.925.981
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343.493.160	DAU	80	%	232.676.669
2	08	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.321.160	DAU	12	Laporan	77.423.984
2	08	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						269.172.000	DAU	12	Laporan	155.252.685
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.408.000	DAU	80	%	104.166.653
2	08	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						68.503.200	DAU	11	Unit	41.598.805
2	08	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.436.000	DAU	12	Unit	18.570.895
2	08	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						117.468.800	DAU	48	Unit	43.996.953
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						807.550.900	DAU/DAK			1.559.154.325
					Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD								18,41	%	
					Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah								3,95	%	
					Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta								31,74	%	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						90.500.000	DAU	100	%	966.311.046



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	02	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						50.000.000	DAU	274		369.855.523
2	08	02	2.01	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU		Laporan	369.855.523
2	08	02	2.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						40.500.000	DAU	0		226.600.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						717.050.900	DAU	1600	Orang	592.843.280
2	08	02	2.02	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						-	DAU	0	Lembaga	110.000.000
2	08	02	2.02	6	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	110.000.000
2	08	02	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						417.050.900	DAU	150	Orang	152.843.280
2	08	02	2.02	9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000.000	DAU	0	Orang	220.000.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan						149.318.200	DAU/DAK	6,02	Rasio	932.738.117
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						66.558.200	DAU/DAK	30	Orang	653.374.797
2	08	03	2.02	6	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						66.558.200	DAU/DAK	30	Orang	327.806.079
2	08	03	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	30	Orang	159.709.700
2	08	03	2.02	9	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	30	Orang	165.859.019
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						82.760.000	DAU/DAK	20,56	%	279.363.321
2	08	03	2.03	5	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						39.305.000	DAU/DAK	51	Lembaga	279.363.321

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	03	2.03	7	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						22.500.000	DAU/DAK	30	Orang	65.397.797
2	08	03	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						20.955.000	DAU/DAK	51	Orang	65.397.797
2	08	04	2.01		Program Peningkatan Kualitas Keluarga						53.255.500	DAU	18	%	1.434.847.712
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU	22	Lembaga	738.357.280
2	08	04	2.01	4	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						-	DAU	2	Lembaga	165.000.000
2	08	04	2.01	5	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	1	Kebijakan	165.000.000
2	08	04	2.01	6	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.						-	DAU	0	Dokumen	181.500.000
2	08	04	2.01	7	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Laporan	226.857.280
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						53.255.500	DAU	22	Lembaga	696.490.432
2	08	04	2.02	6	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	302.184.730
2	08	04	2.02	7	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						53.255.500	DAU	1	Lembaga	197.152.851
2	08	04	2.02	8	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Lembaga	197.152.851
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						-	DAU	100	%	1.398.003.516
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU			1.398.003.516
2	08	05	2.01	3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota						-	DAU	8	Dokumen	1.398.003.516

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	6			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						71.744.500	DAU	KLA	Kategori	715.314.697
2	08	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						20.457.700	DAU	100	%	403.421.750
2	08	6	2.01	3	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						20.457.700	DAU	30	Lembaga	71.188.432
2	08	6	2.01	4	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Orang	166.116.659
2	08	6	2.01	5	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						-	DAU	0	Orang	166.116.659
2	08	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						51.286.800	DAU	95	%	311.892.947
2	08	6	2.02	6	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						41.618.800	DAU	100		249.989.962
2	08	6	2.02	9	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						9.668.000	DAU	3		61.902.985
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak						340.002.300	DAU/DAK	100		1.054.651.334
2	08	7	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						56.150.000	DAU/DAK	70		250.679.323
2	08	7	2.01	6	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota						-	DAU/DAK	2	Dokumen	194.529.323
2	08	7	2.01	7	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA						56.150.000	DAU/DAK	6	Kegiatan	56.150.000
2	08	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						177.242.300	DAU/DAK	100	%	583.263.911



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	08	7	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						10.660.500	DAU/DAK	78	Orang	291.631.956
2	08	7	2.02	13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						166.581.800	DAU/DAK	78	Orang	291.631.956
2	08	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						106.610.000	DAU/DAK	20,56	%	220.708.100
2	08	7	2.03	7	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota						52.500.000	DAU/DAK	2	KIE	37.141.791
2	08	7	2.03	9	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota						-	DAU/DAK	1	Dokumen	91.424.518
2	08	7	2.03	11	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	6	Lembaga	37.141.791
2	08	7	2.03	13	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai						54.110.000	DAU/DAK	150	Orang	55.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	14	2			Program Pengendalian Penduduk						562.600.000	DAU/DAK	21	Usia	661.481.431
2	14	1	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						28.000.000	DAU/DAK	2	Kebijakan	63.999.511
2	14	1	2.01	25	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						3.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	9.905.107
2	14	1	2.01	27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal						25.000.000	DAU/DAK	4	Satuan Pendidikan	25.000.000
2	14	1	2.01	28	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						-	DAU/DAK	0	Laporan	6.190.298

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	1	2.01	30	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						-	DAU/DAK	2	Laporan	6.190.298
2	14	1	2.01	32	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)						-	DAU/DAK	1	Dokumen	4.333.209
2	14	1	2.01	33	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota						-	DAU/DAK	1	Dokumen	12.380.599
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						534.600.000	DAU/DAK	2	Dokumen	597.481.920
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						3.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	37.141.790
2	14	2	2.02	12	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga						207.600.000	DAU/DAK	1	Dokumen	207.600.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						264.000.000	DAU/DAK	1	Dokumen	264.000.000
2	14	2	2.02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						60.000.000	DAU/DAK	12	Laporan	60.000.000
2	14	2	2.02	22	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan						-	DAU/DAK	1	Dokumen	15.475.746
2	14	2	2.02	26	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						-	DAU/DAK	248	Unit	6.190.298
2	14	2	2.02	27	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						-	DAU/DAK	1	Dokumen	7.074.086
2	14	3			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						6.417.406.000	DAU/DAK			6.841.450.884,00
2	14	3			ASFR							DAU/DAK	8,25		
2	14	3			Unmetneed							DAU/DAK	7,24		
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.783.000.000	DAU/DAK	10	Unit	1.293.721.821



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	3	2.01	8	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						-	DAU/DAK	4	Laporan	73.909.141
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						1.078.000.000	DAU/DAK	22	Laporan	433.320.892
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						330.000.000	DAU/DAK	3	Laporan	363.000.000
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						-	DAU/DAK	4	Dokumen	38.379.850
2	14	3	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						125.000.000	DAU/DAK	2	Dokumen	137.500.000
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						250.000.000	DAU/DAK	10	Organisasi	247.611.938
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						744.000.000	DAU/DAK	100	%	2.685.987.761
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						-	DAU/DAK	7	Unit	1.912.975.302
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						744.000.000	DAU/DAK	248		606.649.249
2	14	3	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						-	DAU/DAK	3270	Organisasi	82.175.151
2	14	3	2.02		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						-	DAU/DAK	30	Laporan	84.188.059
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3.184.806.000	DAU/DAK	100	%	1.598.302.676
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						44.100.000	DAU/DAK	12	Laporan	45.000.000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						3.105.156.000	DAU/DAK	7814	Orang	800.748.096



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						-	DAU/DAK	0	Unit	653.695.513
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						35.550.000	DAU/DAK	2	Laporan	86.478.469
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						-	DAU/DAK	0	Orang	12.380.598
2	14	4	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						705.600.000	DAU/DAK	80	%	1.263.438.625
2	14	4	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						705.600.000	DAU/DAK	248	Kampung	706.000.000
2	14	4	2.04	7	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						-	DAU/DAK	248	Dokumen	557.438.625
2	14	4			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						6.746.257.000	DAU/DAK	52,66	Indeks	6.897.503.953
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6.746.257.000	DAU/DAK	88	%	6.897.503.953
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						96.000.000	DAU/DAK	22	Laporan	105.600.000
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						296.457.000	DAU/DAK	4	Laporan	325.904.700
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						130.000.000	DAU/DAK	13	Unit	140.000.000
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						-	DAU/DAK	0	Orang	6.190.298

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
2	14	4	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						6.223.800.000	DAU/DAK	2829	Orang	6.300.000.000
2	14	4	26	25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						-	DAU/DAK	1	Laporan	12.380.598
2	14	4	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						-	DAU/DAK	25	Kelompok	7.428.357



BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2026, dapat kami sampaikan bahwa Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas P3APPKB serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas P3APPKB 2025-2029, maka ditetapkan Program dan kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi, dengan 10 program, 22 kegiatan, 42 sub kegiatan. Program kegiatan yang telah direncanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang tersedia.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dititik beratkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan atau anak dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar.

Blitar, 14 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,


Drs. M. HANKAM INDORO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002